

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang sangat serius untuk ditangani oleh setiap negara didunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangat luas, maka tidak menutup kemungkinan untuk semua kalangan akan menghadapi permasalahan kemiskinan tersebut. Upaya meminimalisir kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua bagian kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu, maka dari itu kemiskinan adalah penyakit dalam ekonomi yang tidak dapat dihilangkan melainkan hanya bisa di dikurangi (Tonapa dkk.,2015).

Permasalahan kemiskinan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang multidimensional karena disebabkan oleh berbagai macam kasus, seperti ketidakberdayaan, kekurangan kapasitas diri, krisis modal sosial dan lain sebagainya dengan menimbulkan masalah-masalah yang tidak sebatas permasalahan ekonomi saja, sehingga setiap elemen masyarakat mempunyai peran sebagai upaya bersama mengentaskan kemiskinan. Konteks kemiskinan yang multidimensional maka dapat dipahami bahwa tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi

individu atau kelompok orang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam islam, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang faqîr, salah satunya pendapat Abi Abdullah Al- Qurtubi ketika

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

menginterpretasikan QS. Al-Taubah ayat 60:

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”(Qs. At-Taubah, ayat 60).

Menurutnya, setidaknya ada 10 pendapat yang menjelaskan tentang makna faqîr. Di antaranya pendapat yang mengemukakan bahwa al-fuqarâ', mufrad kata faqîr, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya (Qurtubi, 2008).

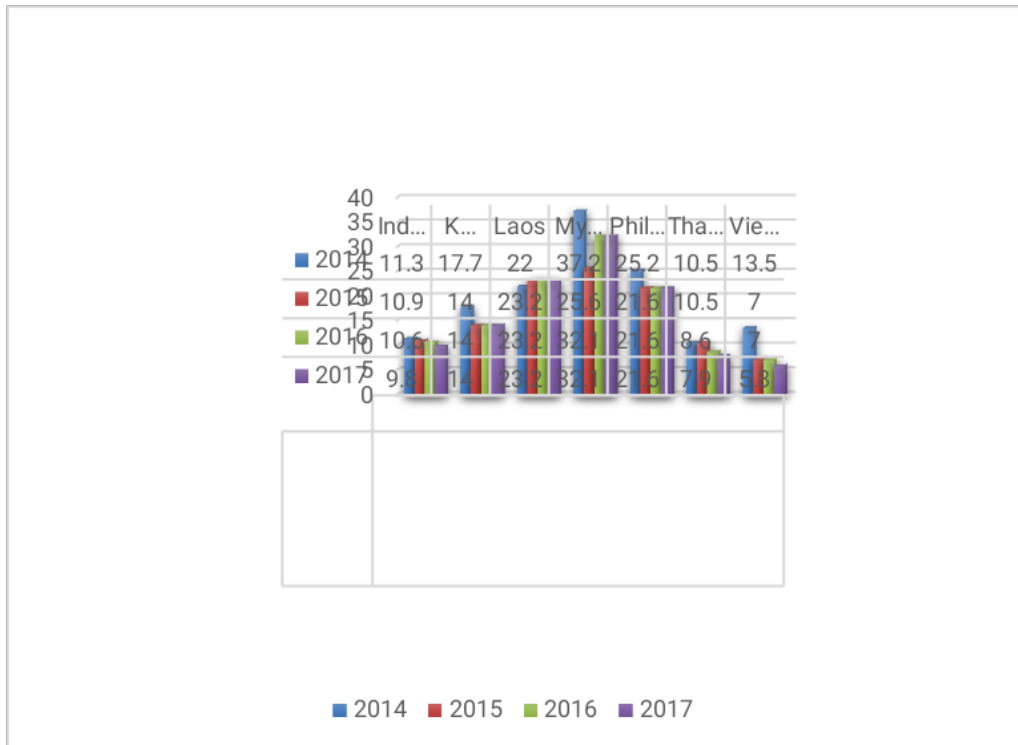
Menurut World Bank (2019), ada 10% dari total jumlah penduduk di dunia yang masih mengalami kemiskinan yang akut pada tahun 2015. Angka 10% tersebut, 5% diantaranya terdapat hanya di 5 negara saja, yakni India, Nigeria, Kongo, Bangladesh dan Ethiopia. Angka 10% tersebut dinilai telah mengalami penurunan dari angka kemiskinan ditahun 2013, namun penurunan tersebut cenderung lambat. Oleh karena itu, peningkatan investasi yang mendukung pengentasan kemiskinan, penurunan konflik antar negara, dan peredaman

gejolak politik perlu diperhatikan di seluruh negara. Indonesia sendiri menyumbang 35,9 juta jiwa berada pada angka kemiskinan dunia pada tahun 2015. Ini menjadi hal positif mengingat dari 258 juta jiwa, hanya ada 10,9% masyarakat yang hidup kurang dari 1,9 USD per hari.

Kemiskinan biasanya sering terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi sudah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2005). Birokrasi yang kompleks juga ditenggarai menjadi penghambat pembangunan ekonomi, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi salah satu hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan (Pratama, 2014).

Negara-negara anggota ASEAN yang tergolong negara berkembang diantaranya Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Kemiskinan di negara-negara tersebut disebabkan karena tingginya tingkat kesenjangan yang

merupakan salah satu masalah yang rumit untuk diselesaikan.

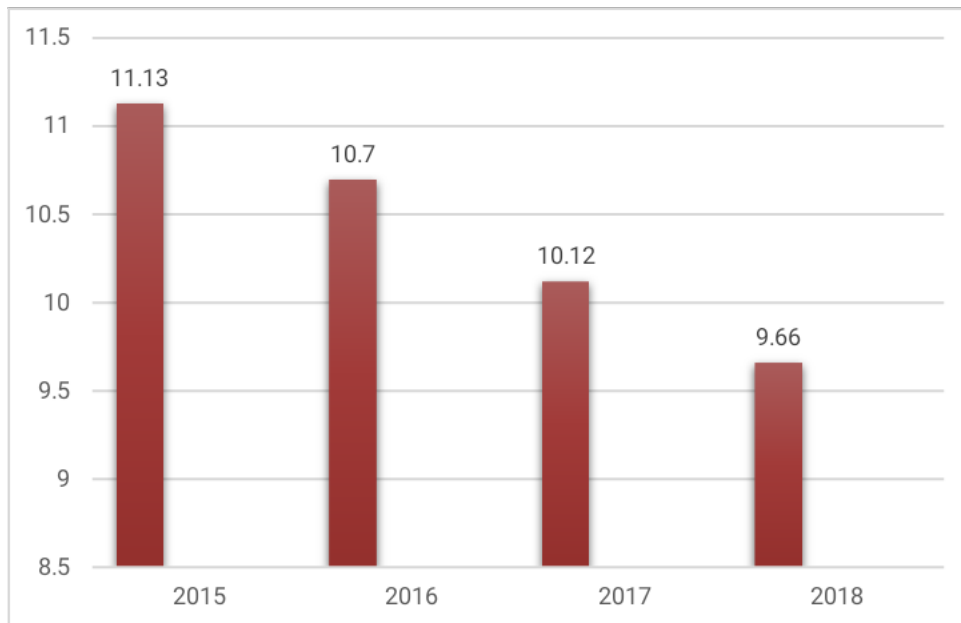


Sumber: Asian Development Bank, 2014-2017 (%).

GAMBAR 1. 1
Kemiskinan di Negara Asean pada tahun 2014-2017

Dari Gambar 1.1, kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun berada di negara Myanmar, dengan presentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 37.2%. Sedangkan pada tahun 2015 presentase penduduk miskin masih ditempati oleh negara Myanmar dengan 25,6%, lalu pada 2016 dan 2017 presentase penduduk miskin masih ditempati oleh negara Myanmar dengan 32.1%. Jadi negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tiap tahunnya ditempati oleh negara Myanmar.

Kemiskinan di Negara Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks untuk di perbincangkan, hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu diperdebatkan di sebuah forum internasional maupun nasional. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (%).

GAMBAR 1. 2
Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2015-2018

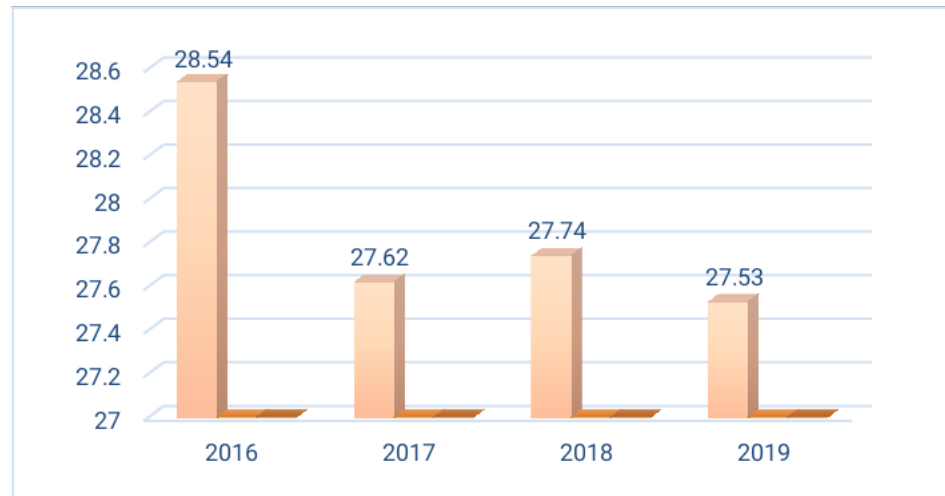
Pada Gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2015, kemiskinan di Indonesia sebesar 11,13%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,7%, pada tahun selanjutnya yakni tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 10,12% dan pada tahun 2018 kemiskinan di Indonesia menjadi hanya 1 digit yakni sebesar 9,66%. Penurunan tersebut tentunya menjadi tren yang baik untuk Indonesia kedepannya, namun rasio penurunannya masih belum maksimal karena dari tahun ke tahun tidak ada penurunan yang mencapai 1%.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar dan ini menjadi hal yang sulit untuk menghindari hal kemiskinan tersebut. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bisa saja berupa soal pengangguran dan ketimpangan sosial yang sangat mendasar di Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk miskin yang banyak berdomisili di pedesaan. Selain itu, masih banyak hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan, seperti ketidakberdayaan, kekurangan kapasitas diri, krisis modal sosial dan lain sebagainya dengan menimbulkan masalah-masalah yang tidak sebatas permasalahan ekonomi saja, sehingga setiap lapisan masyarakat mempunyai peran sebagai upaya bersama mengentaskan kemiskinan.

Ada beberapa provinsi yang menyumbang angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi yang menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai kemiskinan. Tidak hanya tentang besarnya tingkat penduduk miskin di Papua, tapi juga tentang letak geografisnya yang berada di ujung timur Indonesia. Sangat jauhnya letak geografis Provinsi Papua terhadap provinsi-provinsi yang memiliki pembangunan manusia yang lebih maju, akan membuat masyarakat provinsi Papua tidak mampu untuk beradaptasi dengan fasilitas-fasilitas pembangunan manusia yang telah ada di provinsi-provinsi yang lebih maju, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lain sebagainya sehingga hal ini akan berpotensi untuk memperparah tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (%).

GAMBAR 1.3
Persentase
Kemiskinan di
Provinsi Papua
tahun 2016-2019
Dari



Gambar 1.3,

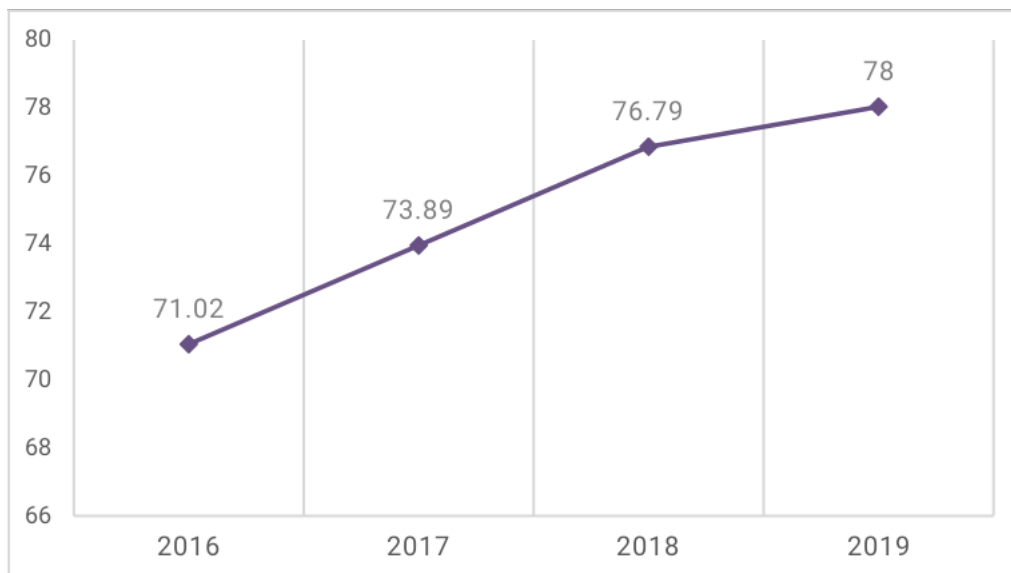
dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2016 kemiskinan di Papua sebesar 28,54%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan persentase kemiskinan menjadi 27,62%. Pada tahun 2018

mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi dan persentase kemiskinan sebesar 27,74%. Pada tahun 2019 kemiskinan kembali turun menjadi 27,53%. Secara keseluruhan, persentase kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan dan rata-rata persentasenya berada di 27%.

Dalam memahami masalah-masalah pada kemiskinan yang ada di Indonesia ini, tidak hanya tentang situasi ekonomi dan kesejahteraan saja namun perlu memperhatikan juga lokalitas di setiap masing-masing daerah, yaitu kemiskinan yang berada pada tingkat lokal yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat.

Tingkat pendidikan di Provinsi Papua merupakan salah satu penghambat penambahan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Karena pada dasarnya, kemajuan suatu negara dimulai dari warga negara yang memiliki wawasan dan ide gagasan yang tinggi. Kedua hal tersebut dapat dimiliki berawal dari pendidikan. Banyak sekali indikator-indikator pendidikan yang ada di Indonesia, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator yang mampu merepresentasikan seberapa besar masyarakat mengetahui tentang huruf dan angka yang ada dan juga cara membaca huruf dan angka tersebut. Karena ini merupakan kunci utama agar peningkatan pendidikan di masyarakat bisa tumbuh dan nantinya akan meningkatkan kualitas manusia. Kualitas manusia meningkat maka mereka akan mampu untuk setidaknya bertahan hidup dan menjauhi diri mereka dari jurang kemiskinan. Maka dari itu kemelekan



masyarakat terhadap huruf atau angka tentu sangat penting.

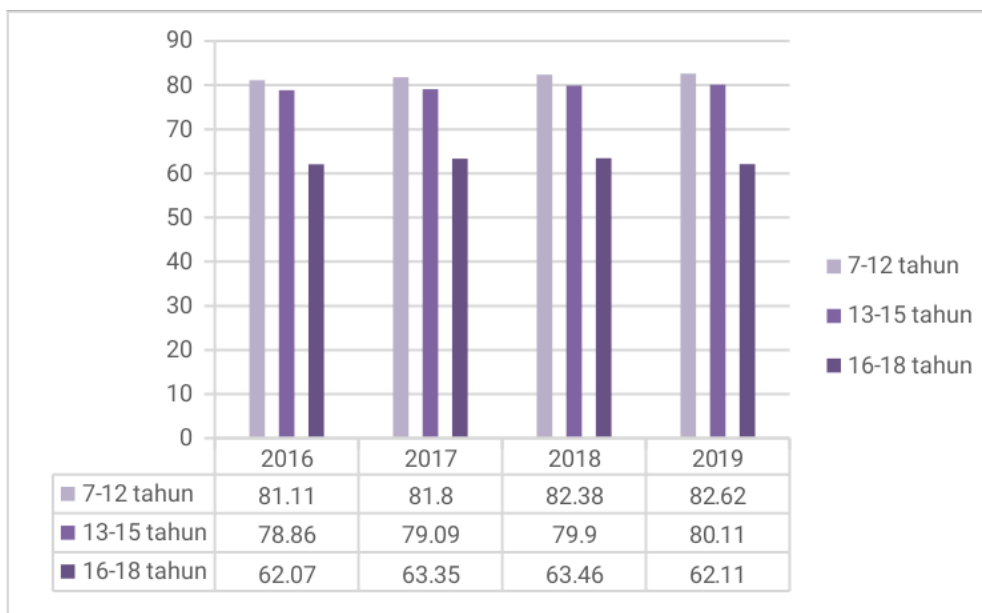
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019(%).

GAMBAR 1. 4
Angka Melek Huruf Provinsi Papua Tahun 2016-2019

Dari Gambar 1.4, dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami kondisi yang konsisten meningkat. Pada tahun 2016 angka melek huruf di Papua sebesar 71,02%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 73,89%. Peningkatan angka melek

huruf dari tahun 2016 ke 2017 adalah sebesar 2,87%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 76,79%. Peningkatan angka melek huruf dari tahun 2017 ke 2018 adalah sebesar 2,9%. Pada tahun 2019 angka melek huruf mengalami peningkatan kembali menjadi 78%. Peningkatan angka melek huruf dari tahun 2018 ke 2019 yakni sebesar 1,21%.

Angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator pendidikan lain yang ada di Indonesia. Angka partisipasi sekolah ini menjelaskan tentang seberapa banyak masyarakat yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, dilihat pada setiap kategori usia masyarakat yakni, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah di setiap kategori usia, maka semakin banyak masyarakat di berbagai lapisan usia yang telah menikmati bangku pendidikan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (%).

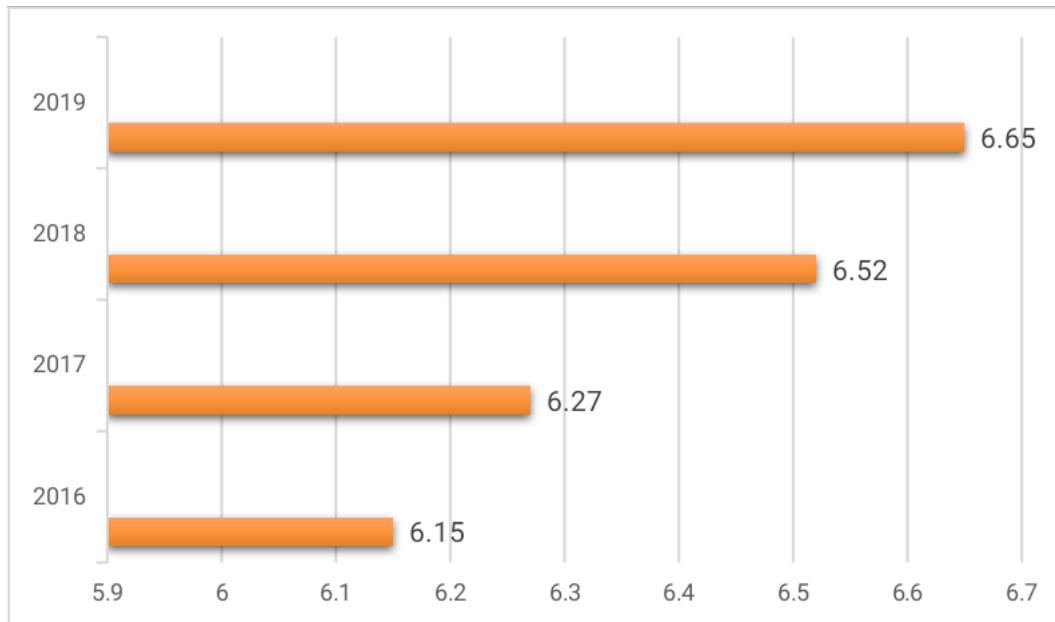
GAMBAR 1. 5
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2016-2019

Dari Gambar 1.5, dapat disimpulkan bahwa terdiri dari beberapa kategori pada angka partisipasi sekolah ini, yakni usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun. Pada kategori usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah di Papua sebesar 81,11%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 81,8%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dari tahun 2016 ke 2017 adalah sebesar 0,29%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 82,38%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dari tahun 2017 ke 2018 adalah sebesar 0,42%. Pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan menjadi 82,62%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dari tahun 2018 ke 2019 yakni sebesar 0,24%. Selanjutnya untuk kategori usia 13-15 tahun angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah di Papua sebesar 78,86%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 79,09%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun dari tahun 2016 ke 2017 adalah sebesar 0,23%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 79,9%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun dari tahun 2017 ke 2018 adalah sebesar 0,81%. Pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan menjadi 80,11%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun dari tahun 2018 ke 2019 adalah sebesar 0,21%. Terakhir untuk kategori usia 16-18 tahun angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami

kondisi yang fluktuatif disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah di Papua sebesar 62,07%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 63,35%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dari tahun 2016 ke 2017 adalah sebesar 1,25%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 63,46%. Peningkatan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dari tahun 2017 ke 2018 adalah sebesar 0,11%. Pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan menjadi 62,11%. Penurunan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dari tahun 2018 ke 2019 adalah sebesar 1,35%. Secara keseluruhan, angka partisipasi sekolah per kategori selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada kategori usia 16-18 tahun saja yang mengalami penurunan. Ini menjadi ironi, karena usia 16-18 tahun adalah masyarakat yang sedang mencari ilmu di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang setelah selesai nanti mereka akan memilih apakah lanjut ke universitas atau melanjutkan pekerjaan.

Indikator terakhir terkait pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang yang akan memiliki pengaruh besar terhadap penurunan tingkat

kemiskinan disuatu daerah tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (%)

GAMBAR 1. 6

Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Tahun 2016-2019

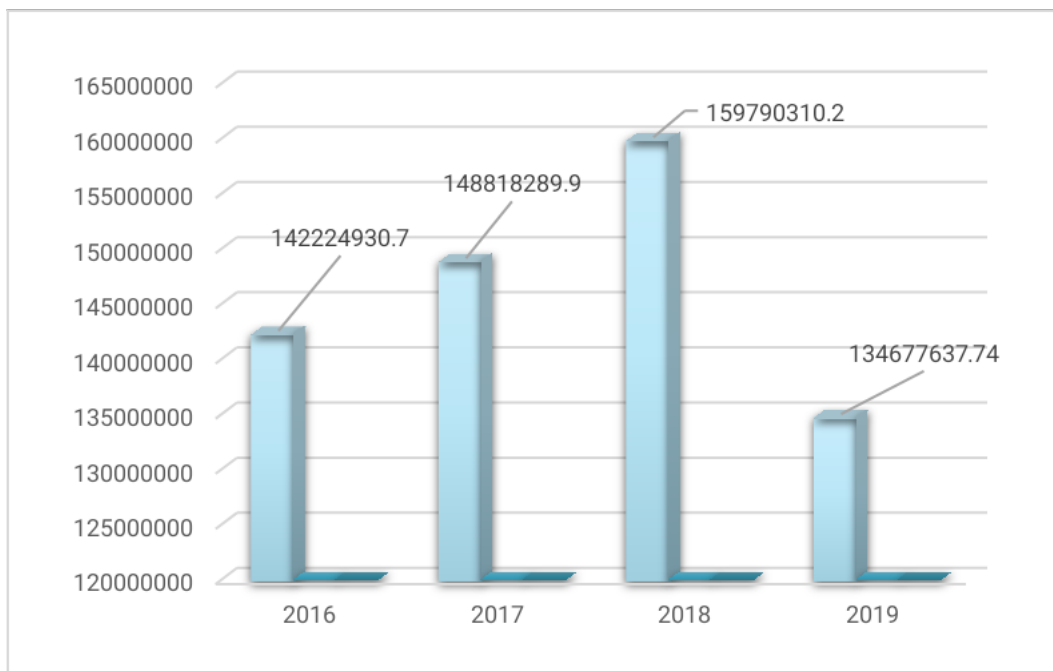
Dari Gambar 1.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami kondisi yang konsisten meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di Papua sebesar 6,15 tahun. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 6,27 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2016 ke 2017 adalah sebesar 0,17 tahun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 6,52 tahun. Peningkatan angka melek huruf dari tahun 2017 ke 2018 adalah sebesar 0,45 tahun. Pada tahun 2019 angka melek huruf mengalami peningkatan kembali menjadi 6,65 tahun. Peningkatan angka melek huruf dari tahun 2018 ke 2019 yakni sebesar 0,13 tahun.

Selain di bidang pendidikan, kemiskinan juga dapat dikatakan apabila

orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menyebabkan kurangnya pendapatan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari bagaimana cara meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri, masalah pendidikan, tingkat kesehatan, laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah tersebut karena semua itu mempengaruhi kemiskinan.

Pembangunan struktur ekonomi yang ideal merupakan suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi agar semua keputusan yang diambil dapat berjalan tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam keputusan ini data statistik mempunyai perencanaan yang sangat penting untuk strategi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang ada, misalnya seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi daerah bekerjasama antara pemerintahan sector privat dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemiskinan selalu berkaitan dengan orang yang tidak mampu mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang

berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2015).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (%).

GAMBAR 1. 7
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua
Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 1.7, Nilai PDRB di Provinsi Papua mengalami kondisi yang fluktuatif disetiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016 nilai PDRB provinsi Papua sebesar Rp. 142.224.930 juta rupiah, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 148.818.289 juta rupiah, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp. 159.790.310 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp. 134.677.637 juta rupiah.

Keempat variabel di atas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya yang diteliti oleh Amalia (2017) yang menggunakan variabel AMH (Angka Melek Huruf). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

AMH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, dan Gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Variabel APS (Angka Partisipasi Sekolah) yang dilakukan oleh Giovanni (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel APS dan Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. dan PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Variabel RLS (Rata-rata Lama Sekolah) yang dilakukan oleh Tambun dan Herawaty (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, lalu variabel TPT, TPAK dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Dan variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dilakukan oleh Girsang dkk (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, lalu variabel tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul *“Analisis Pengaruh Sektor Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua (Studi kasus di 29 Kabupaten Kota Papua Tahun 2016-2019)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh AMH (Angka Melek Huruf) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh APS (Angka Partisipasi Sekolah) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh RLS (Rata-rata Lama Sekolah) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019?
4. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh AMH terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh APS terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh APS terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka

diharapkan penelitian ini menghasilkan manfaat bagi pihak dan instansi yang terkait diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam berfikir terkait dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Kemiskinan di Provinsi Papua.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah daerah Provinsi Papua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait pada penelitian selanjutnya.

3. Secara pemilihan kebijakan baik untuk pusat maupun daerah, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan yang relevan agar kontribusi dibidang pendidikan mampu untuk meminimalisir keparahan kondisi kemiskinan di Provinsi Papua.